



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 98 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 98**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN MEKARMUkti
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2022 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan maka semakin besar pula tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleksnya tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat, sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Camat sebagai Kepala SKPD berkewajiban membuat Renstra SKPD.

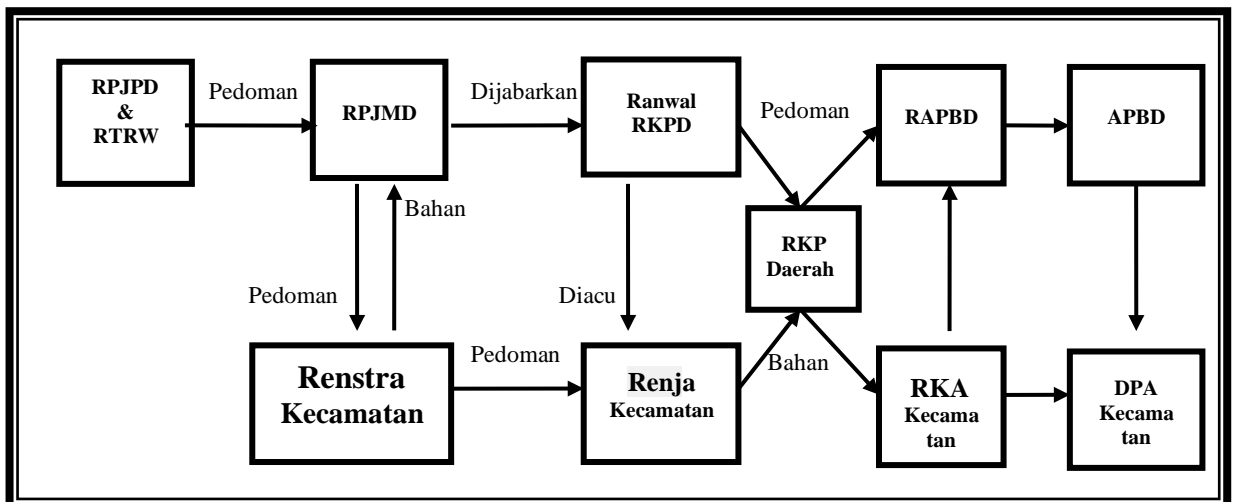
Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**good governance**). Oleh sebab itu kebijakan umum yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang meliputi demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak penyusunan Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Misi

Kabupaten Garut, salah satu dari Misi Kabupaten Garut yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah“.

Selanjutnya berdasarkan Renstra SKPD tersebut di tuangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Mekarmukti untuk rentang waktu Tahun 2019 sampai dengan 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022. Kecamatan Garut selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garut. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Garut Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Mekarmukti untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 7

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
21. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mekarmukti merupakan dokumen perencanaan kecamatan Mekarmukti untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan prioritas pembangunan yang yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Mekarmukti guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2022 Sebagai Tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta Menyusun Program , kegiatan dan sub Kegiatan secara terpadu , terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintahan untuk

memahami dan menilai arah kebijakan Program dan Kegiatan Operasional Tahunan

1.4. Sistematika Penyusunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mekarmukti

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mekarmukti

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat hasil Musrenbang

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mekarmukti

3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

v. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEKARMUKTI
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mekarmukti

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2020 Kecamatan Mekarmukti melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2020 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 93,45 %. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Mekarmukti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Mekarmukti, antara lain:

- 1) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

- 2) Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
- 3) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Mekarmukti melaksanakan 5 program 13 kegiatan 23 Sub Kegiatan dan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2021 mencapai 100%. Sedangkan, capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II mencapai 45,96% dengan predikat SR dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II mencapai 45,96 % dengan predikat SR pula. Hal ini terjadi sebagai akibat/dampak dari pencairan anggaran pada Triwulan II yang mengalami keterlambatan terkait Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencairan anggaran dimaksud. Selain itu, ada beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum terealisasi karena direncanakan pada Tribulan selanjutnya. Untuk rata-rata capaian kinerja Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti sampai dengan Tahun 2021 mencapai 45%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Mekarmukti sehingga capaian tidak diakumulasi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 Kecamatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat		Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13= 12/7*100		14= 6+12		15=14/5*100		16
7	01	01		4.221.326.522			2.221.326.522	22	495.556.480	29	640.048.948					51	1.135.605.428	51	1.135.605.428	51	1.135.605.428	27	1.135.605.428	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2.01	85.385.000			85.385.000	10	8.178.500	63	53.485.855					72	61.664.355	72	61.664.355	72	61.664.355	72	61.664.355		
7	01	01	2.01	85.385.000			85.385.000	10	8.178.500	63	53.485.855					72	61.664.355	72	61.664.355	72	61.664.355	72	61.664.355		
7	01	01	2.02	1.594.492.646			1.594.492.646	20	319.103.602	27	424.089.899					47	743.193.501	47	743.193.501	47	743.193.501	47	743.193.501		
7	01	01	2.02	1.582.252.946			1.582.252.946	20	319.103.602	27	424.089.899					47	743.193.501	47	743.193.501	47	743.193.501	47	743.193.501		
7	01	01	2.02	12.239.700			12.239.700	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.05	10.000.000			10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.05	10.000.000			10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.06	322.037.376			322.037.376	48	156.112.000	10	31.710.000					58	187.822.000	58	187.822.000	58	187.822.000	58	187.822.000		
7	01	01	2.06	21.124.000			21.124.000	-	-	17	3.500.000					17	3.500.000	17	3.500.000	17	3.500.000	17	3.500.000		
7	01	01	2.06	135.219.676			135.219.676	84	113.111.000	2	2.500.000					85	115.611.000	85	115.611.000	85	115.611.000	85	115.611.000		

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	34.448.600		34.448.600	36	12.551.000	-					36	12.551.000	36	12.551.000	36	12.551.000	36	12.551.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	13.405.100		13.405.100	7	1.000.000	10	1.300.000				17	2.300.000	17	2.300.000	17	2.300.000	17	2.300.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku bangunan /Material	Jumlah bahan /material																		
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	39.600.000		39.600.000	25	9.900.000	17	6.600.000				42	16.500.000	42	16.500.000	42	16.500.000	42	16.500.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.240.000		78.240.000	25	19.550.000	23	17.810.000				48	37.360.000	48	37.360.000	48	37.360.000	48	37.360.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.125.232.500		125.232.500	1	1.740.000	94	118.182.300				96	119.922.300	96	119.922.300	96	119.922.300	96	119.922.300
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	75.233.000		75.233.000	2	1.740.000	91	68.600.000				93	70.340.000	93	70.340.000	93	70.340.000	93	70.340.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	49.999.500		49.999.500	-		99	49.582.300				99	49.582.300	99	49.582.300	99	49.582.300	99	49.582.300
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2.000.000.000																	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.079.000		44.079.000	17	7.357.278	20	8.966.494				37	16.323.772	37	16.323.772	37	16.323.772	37	16.323.772
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	18.138.600		18.138.600	15	2.753.178	22	3.966.494				37	6.719.672	37	6.719.672	37	6.719.672	37	6.719.672
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	7.060.000		7.060.000	18	1.256.900	-					18	1.256.900	18	1.256.900	18	1.256.900	18	1.256.900
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	18.880.400		18.880.400	18	3.347.200	26	5.000.000				44	8.347.200	44	8.347.200	44	8.347.200	44	8.347.200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan	40.100.000		40.100.000	8	3.065.100	9	3.614.400				17	6.679.500	17	6.679.500	17	6.679.500	17	6.679.500

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah			
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01					KECAMATAN									4.623.400.000	0	0		1.582.251.946		
7	01	01							100,00 %	100,00 %	1.102.000.000	0	0				100,00 %	1.582.251.946			
7	01	01	2,01								83.000.000	0	0						0		
7	01	01	2,01	01					0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	0	0					0 Dokumen	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,01	04					0 HOK	0 HOK	58.000.000	0	0					0 HOK	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,02								30.000.000	0	0							1.582.251.946	
7	01	01	2,02	01					1 tahun	1 tahun	0	0	0	Kab. Garut Mekarmuk Semua Kelurahan	Dana , Transfer tiU, mum- Dana Alokasi Umum			1 tahun	1.582.251.946	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,02	09					0 Tahun	0 Tahun	30.000.000	0	0					0 Tahun	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03								973.000.000	0	0							0	
7	01	01	2,03	02					0 bulan	0 bulan	14.000.000	0	0					0 bulan	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03	06					0 lembar	0 lembar	22.000.000	0	0					0 lembar	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03	08					0 Orang	0 Orang	25.000.000	0	0					0 Orang	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03	09					0 item	0 item	5.000.000	0	0					0 item	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03	10					0 item	0 item	27.000.000	0	0					0 item	0	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,03	11					0 jenis	0 jenis	27.000.000	0	0					0 jenis	0	Kecamatan Mekarmukti	

7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					2.465.400.000	0	0							0		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan kecamatan Jumlah lokasi pengadaan tanah kantor kecamatan			0 pelayanan 0 lokasi	0 pelayanan 0 lokasi	2.465.400.000	0	0						0 pelayanan 0 lokasi	0	Kecamatan Mekarmukti
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					50.000.000	0	0								0	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					50.000.000	0	0								0	
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Penanganan Covid 19			0 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000	0	0						0 Kegiatan	0	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					97.000.000	0	0								0	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					97.000.000	0	0								0	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli			0 bulan	0 bulan	47.000.000	0	0						0 bulan	0	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan MTQ			0 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000	0	0						0 Kegiatan	0	Kecamatan Mekarmukti
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100,00 %	100,00 %	300.000.000	0	0						100,00 %	0	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					300.000.000	0	0								0	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forkoncam			0 kegiatan	0 kegiatan	300.000.000	0	0						0 kegiatan	0	Kecamatan Mekarmukti
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					120.000.000	0	0								0	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					120.000.000	0	0								0	
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penegakan perda di kecamatan			0 Kegiatan	0 Kegiatan	76.000.000	0	0						0 Kegiatan	0	Kecamatan Mekarmukti

7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang diusulkan mengikuti lomba di tingkat kabupaten			0 desa	0 desa	44.000.000	0	0					0 desa	0	Kecamatan Mekarmukti		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %	0	2.221.326.522	2.241.429.722				100,00 %	2.213.478.401			
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	85.385.000	85.385.000						36.990.000		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan			3 Dokumen	3 Dokumen		0	85.385.000	85.385.000	Kab. Garut Mekarmuk Mekarmuk	Dana Transfer Umum Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekarmukti	3 Dokumen	36.990.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	1.594.491.646	1.594.491.646							1.595.051.946	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	1 tahun		0	1.582.251.946	1.582.251.946	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan mekarmukti	1 tahun	1.582.251.946	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan		0	12.239.700	12.239.700	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan mekarmukti	1 laporan	12.800.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	10.000.000	10.000.000							15.400.000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2 Orang	2 Orang		0	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN kecamatan Mekarmukti	2 Orang	15.400.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							322.037.376	342.140.576								257.426.455	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22 jenis	22 jenis		0	21.124.000	21.124.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	22 jenis	16.473.875	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			24 jenis	24 jenis		0	135.219.676	155.322.876	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	24 jenis	87.155.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga			25 jenis	25 jenis		0	34.448.600	34.448.600	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	25 jenis	28.600.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2 item	2 item		0	13.405.100	13.405.100	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	2 item	14.737.580	Kecamatan Mekarmukti

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu				110 orang	110 orang	0	39.600.000	39.600.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	110 orang	43.560.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	0	78.240.000	78.240.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	12 bulan	66.900.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	125.233.500	125.233.500							219.000.000		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 unit	3 unit	0	75.234.000	75.234.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan Mekarmukti	3 unit	131.000.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel				4 item	4 item	0	49.999.500	49.999.500	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	4 item	54.000.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kanto				6 item	6 item	0	0	0	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan Mekarmukti	6 item	34.000.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	44.079.000	44.079.000							45.500.000		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	0	18.138.600	18.138.600	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan mekarmukti	12 bulan	19.000.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara				2 item	2 item	0	7.060.000	7.060.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan mekarmukti	2 item	6.500.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 orang/ kegiatan	1 orang/ kegiatan	0	18.880.400	18.880.400		Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan mekarmukti	1 orang/ kegiatan	20.000.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	40.100.000	40.100.000							44.110.000		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Operasional kendaraan dalam lingkungan Kantor Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				3 unit 10 lembar	3 unit 10 lembar	0	40.100.000	40.100.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum Alokasi Umum			kecamatan Mekarmukti	3 unit 10 lembar	44.110.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%		%	100,00 %	100,00 %	0	224.368.140	274.398.340							100,00 %	284.110.000	

7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	188.523.140	238.553.340							246.000.000			
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	188.523.140	238.553.340	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer "U m um- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekarmukti		246.000.000	Kecamatan Mekarmukti		
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	35.845.000	35.845.000							38.110.000			
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan				1 pelayanan	1 pelayanan	0	35.845.000	35.845.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer "U m um- Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekarmukti	1 pelayanan	38.110.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%		100 %	100 %	0	65.538.400	65.538.400					100 %	71.600.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	25.968.400	25.968.400								28.600.000		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25.968.400	25.968.400	Kab. Garut Mekarmuk Mekarmuk	Dana Transfer "U m um- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan mekarmukti	1 Dokumen	28.600.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0	39.570.000	39.570.000								43.000.000		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				66 orang	66 orang	0	39.570.000	39.570.000	Kab. Garut Mekarmuk Mekarmuk	Dana Transfer "U m um - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	IBU-Ibu PKK	66 orang	43.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%		100 %	100 %	0	197.910.200	147.880.000						100 %	233.650.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	197.910.200	147.880.000								233.650.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Patroli				12 bulan	12 bulan	0	147.880.000	147.880.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer "U m um- Dana Alokasi Umum			Satpol PP	12 bulan	178.650.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan MTQ				1 kegiatan	1 kegiatan	0	50.030.200	0	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer "U m um- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Satpol PP	1 kegiatan	55.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%		100,00 %	100,00 %	0	0	0						100,00 %	58.500.000	

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	0	0							58.500.000			
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kecamatan mekarmukti	1 kegiatan	58.500.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	0	19.360.000	19.360.000						100 %	49.300.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	19.360.000	19.360.000							49.300.000		
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi penegakan perda di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	19.360.000	19.360.000	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Mekarmukti	1 kegiatan	22.900.000	Kecamatan Mekarmukti	
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0	0	0	Kab. Garut Mekarmuk Cijayana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat Mekarmukti		26.400.000	Kecamatan Mekarmukti	
TOTAL																					4.492.890.347	
											4.623.400.000	2.728.503.262	2.748.606.462								4.492.890.347	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mekarmukti

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Mekarmukti, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Mekarmukti dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Garut;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Mekarmukti;

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mekarmukti dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Survey Kepuasan Masyarakat				75	76	77	78	79	75	76				75	76			
2	Desa Dengan Kinerja Baik				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
3	Nilai Sakip Kecamatan				C	C	B	BB	BB	C	C				C	C			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mekarmukti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan** peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang **kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi** kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut.
2. **Optimalisasi** partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Corporate Sosial Responsibility (CSR)**, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Pelayanan Prima.** Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya kepada pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur** dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b) Program prioritas pembangunan daerah; dan
- c) Rencana kerja.

Pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai

pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Mekarmukti.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Peting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN												
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 dokumen	100 %	53.923.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	103.315.850
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Tahun	100 %	1.740.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.914.524.855
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	13.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.463.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pakaian yang tersedia	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	24 14 Steal	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.850.000
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan evaluasi, penilaian kinerja pegawai	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.000.000

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 orang	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								400.690.921				445.873.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	22 jenis	100 %	23.082.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.560.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	37 jenis	100 %	149.426.681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	164.825.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	25 jenis	100 %	36.735.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	41.682.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	6 jenis	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16.220.000
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah bahan /material	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	6 jenis	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	2640 per orang	100 %	47.916.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	47.916.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	100 %	68.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	94.670.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.899.369.700				3.035.500.000	
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Unit	100 %	344.370.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	475.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah item Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 item	100 %	54.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.500.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Bangunan Gedung yang di bangun	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	2 Unit	100 %	2.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.500.000.000

								Kecamatan	Kecamatan						Umum		Kecamatan					
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	5 Pelayanan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	43.372.000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								50.000.000							55.000.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								50.000.000									55.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	5 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	27.500.000			
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	27.500.000			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								260.492.800								261.471.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								239.272.800									239.471.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan Patroli	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	100 %	184.239.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	178.935.000			
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan MTQ	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 kegiatan	100 %	55.033.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.536.000			
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								21.220.000								22.000.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 kali	100 %	21.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	22.000.000			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								150.000.000								357.500.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								150.000.000									357.500.000
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	275.000.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mekarmukti pada Tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturinya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di wilayah Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan forkopimcam, UPT dan Organisasi Pemerintah yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Mekarmukti maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan oleh pengembangan delegasi.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan menggambarkan pembangunan di Kecamatan Mekarmukti yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat (sebagaimana terlampir) diantaranya:

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Pemerintah;
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Daerah/Infrastuktur;
- Program Peningkatan Sarana Sosial Budaya;
- Program Peningkatan Sarana Ekonomi.

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Mekarmukti telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui Musrenbang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *acuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Mekarmukti dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mekarmukti

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Mekarmukti mempunyai tujuan:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
- 2) Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan;
- 3) Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Mengoptimalkan Kesertaan Potensi Masyarakat dalam Pemerintahan.

Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran:

- 1) Tersedianya aparaturnya yang profesional;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja secara optimal;
- 3) Terakomodasinya gagasan dan kepentingan masyarakat;
- 4) Terwujudnya kondusifitas dan sinergitas secara optimal.

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kecamatan Mekarmukti maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah ;
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:
 - 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum.
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Mekarmukti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN					6.053.109.421									7.087.269.705
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.262.818.321									5.651.389.705
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					53.923.500									103.315.850
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 dokumen	100 %	53.923.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		103.315.850
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.754.000.000									1.927.987.855
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Tahun	100 %	1.740.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		1.914.524.855
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	13.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		13.463.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60.000.000									36.850.000
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pakaian yang tersedia	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	24 14 Steal	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.850.000
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan evaluasi, penilaian kinerja pegawai	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		11.000.000

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 orang	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								400.690.921					445.873.000
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	22 jenis	100 %	23.082.640	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.560.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	37 jenis	100 %	149.426.681	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	164.825.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	25 jenis	100 %	36.735.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	41.682.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	6 jenis	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16.220.000
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah bahan /material	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	6 jenis	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	2640 per orang	100 %	47.916.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	47.916.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	100 %	68.530.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	94.670.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.899.369.700				3.035.500.000	
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Unit	100 %	344.370.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	475.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah item Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 item	100 %	54.999.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.500.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Bangunan Gedung yang di bangun	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	2 Unit	100 %	2.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	2.500.000.000

7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	5 laporan	100 %	39.429.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	39.600.000		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	5 Pelayanan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	43.372.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								50.000.000					50.000.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								50.000.000						50.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	5 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	27.500.000		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	27.500.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								260.492.800						261.471.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								239.272.800							239.471.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan Patroli	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	100 %	184.239.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	178.935.000		
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan MTQ	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 kegiatan	100 %	55.033.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.536.000		
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								21.220.000						22.000.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 kali	100 %	21.220.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	22.000.000		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								150.000.000							357.500.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								150.000.000							357.500.000
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 kali	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	275.000.000		
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peserta Sosialisasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	50 orang	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	0		

					Nasional			Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat							yang Dilimpahkan Kepada Camat					
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forkoncam	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 kegiatan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	82.500.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							138.600.000							175.825.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							138.600.000								175.825.000
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 kali	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	44.000.000		
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah sosialisasi penegakan perda di kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 kegiatan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	23.425.000		
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 kegiatan	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	77.000.000		
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen RPTK	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	28.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	31.400.000		
												TOTAL	6.053.109.421						7.087.269.705	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU 2023

Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebesar Rp. 6.053.109.421,- didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.923.500,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.754.000.000,-
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.400.690.921,-
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.899.369.700,-
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 50.764.200,-
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dialokasikan sebesar Rp. 44.070.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dialokasikan sebesar Rp. 151.768.800,-

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dialokasikan sebesar Rp. 239.272.800,-
 - b. Koordinasi Penerapan dan penegakan persatuan Daerah dan Persatuan Kepala Daerah dialokasikan sebesar Rp. 21.220.000,-
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000,-
- 6. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan dialokasikan sebesar Rp. 138.600.000,-

BAB V P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Mekarmukti dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam visi Kabupaten Garut.

Perencanaan ini dibuat secara partisipasi, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *Stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mekarmukti. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Mekarmukti ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atau Tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga Implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat di pertanggungjawabkan.
2. Sosialisasi rencana kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan Implementasi Renstra serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renja yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *Stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan Sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan

semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis yang dibuat.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan tempat yang telah ditetapkan di Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, Pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dilakukan terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dalam rangka menjamin pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, sehingga dapat mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Pemerintah Kabupaten Garut: "Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**, Aamiin.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN